

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini dunia sedang dihadapkan dengan fenomena globalisasi. Fenomena globalisasi yang terjadi saat ini memiliki sifat yang ambivalen. Dengan kata lain globalisasi dapat mendatangkan banyak sekali manfaat, namun di sisi lain globalisasi menghadirkan juga ancaman yang membahayakan. Bagi mereka yang terlebih dahulu mengalami modernisasi dan memiliki modal (*capital*) yang banyak, globalisasi justru akan mendatangkan banyak manfaat. Namun di sisi lain bagi mereka negara-negara berkembang dan atau negara dunia ketiga, globalisasi justru juga menghadirkan permasalahan baru.

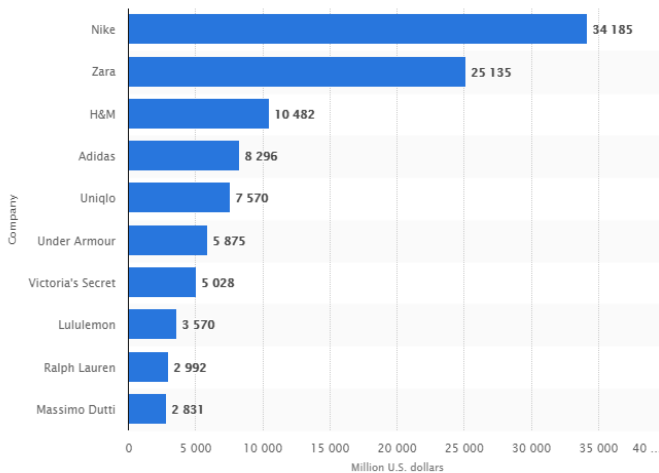
Salah satu hasil dari pesatnya globalisasi adalah hadirnya *Multinational Corporation*. MNC adalah faktor penting yang mendorong terjadinya proses globalisasi ekonomi dunia menuju integrasi ekonomi tanpa batas. MNC saat ini juga dianggap sebagai aktor yang turut diperhatikan kekuatannya dalam perekonomian global. Data statistik menyebutkan pada akhir 1990-an, terdapat sekitar 53.000 MNC di dunia dengan 450.000 anak perusahaan di berbagai belahan dunia¹ Jumlah ini kemudian bertambah menjadi 63.000 MNC dengan sekitar 690.000 anak perusahaan pada tahun 1998.²

MNC yang akan penulis teliti adalah Nike Inc. di Indonesia. Nike sendiri merupakan perusahaan dari Amerika Serikat dan salah satu perusahaan *apparel* olah raga terbesar di dunia yang terkenal dengan produk sepatunya yang memiliki desain modern dan berkualitas tinggi. Mereka terkenal karena mensponsori beberapa

¹ Frieden, J. A., & Lake, D. A. (1996). *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth* (4 ed.). New York: Routledge. Hal. 141

² Cohn, T. H. (2003). *Global Political Economy: Theory and Practice* (2 ed.). New York: Addison Wesley Longman Inc. Hal. 319

olahragawan terkenal di dunia seperti Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Tiger Woods dan Michael Jordan. Nike Inc didaulat menjadi merek (brand) paling bernilai di muka bumi. Merek ini memiliki nilai 19 miliar dolar AS, naik 1,7 miliar dolar AS dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 13,7 miliar dolar AS. Nike Inc mencatatkan kapitalisasi pasar sebesar 71 miliar dolar AS. Nike Inc sendiri menguasai 62 persen di pasar sepatu atletik di Amerika Serikat.



Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Nilai Top 10 Brand Internasional Tahun 2017

Dengan penghasilan yang besar dan juga didaulat sebagai merek paling berharga di dunia membuat Nike Inc juga tidak jarang dalam mensponsori acara-acara olahraga besar dan tercatat dari tahun 2002 hingga saat ini Nike Inc telah mengeluarkan dana 8 miliar dolar AS untuk anggaran sponsor dan pendanaan. Namun hal ini tidak membuat Nike Inc lebih peduli terhadap kesejahteraan buruhnya seperti apa yang dilakukan oleh buruh Nike Inc di Tiongkok dan Indonesia di mana mereka menuntut upah yang layak serta asuransi kerja dan pembiayaan yang layak.

Nike Inc sendiri hadir di Indonesia pada tahun 1988. Sepatu-sepatu yang ada pada saat itu sepertiganya masih dari produksi Amerika Serikat. Selanjutnya pengerjaan produk sepatu Nike Inc dilakukan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh koordinator perusahaan Nike Inc di Indonesia, perusahaan Nike Inc menggunakan sekitar 11 kontraktor pada awalnya. Dari sekian banyak kontraktor tersebut ialah kontraktor yang dulunya merupakan perusahaan asosiasi Nike Inc di Korea Selatan dan Taiwan.

Perusahaan Nike Inc di Indonesia mempunyai komunikasi dan interaksi cukup dekat dengan kontraktor yang ada. Hal ini bisa dibuktikan dengan diberinya kesempatan tenaga Indonesia untuk ikut memeriksa kualitas dan proses pengerjaan dengan mengikuti anggaran persayatan ketat perusahaan Nike Inc di Amerika Serikat. Untuk wilayah Indonesia, perusahaan yang mengerjakan sepatu Nike Inc berada di wilayah Tangerang dan Serang. Kedua daerah ini merupakan daerah yang baru dikembangkan sebagai wilayah industri.

Menurut *Harian Tempo*, total investasi Nike Inc. di Indonesia sebanyak 600-700 juta dolar AS, dengan total produksi ekspor sebanyak 50-60 juta pasang sepatu. Dari tahun 1967 hingga 2007, nilai investasi industri sepatu ini berkisar sekitar 2,13 miliar dolar AS, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja hingga 317 ribu tenaga kerja. Meskipun industri ini sempat tutup pada tahun 2003-2005, investasi baru muncul kembali dengan pembangunan pabrik sepatu selama 2006-2007 sebanyak 9 perusahaan dengan nilai investasi sekitar 78,72 juta USD.³ Jumlah investasi yang besar ini tentu saja sangat signifikan untuk memenuhi kebutuhan pemasukan negara dari investasi asing, yang diperkirakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masanya mencapai 220 miliar dolar AS setiap tahunnya untuk periode tahun 2009-2014.⁴ Investasi yang besar dan

³ *Nike Sepakat Perpanjang Kontrak*. (2007, Juli 31). Diambil kembali dari *Tempo*: <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2007/07/31/brk,20070731-104694,id.html>

⁴ *Jakarta Globe*. (2009, November 14). While Global Recovery Sputters, Indonesia Strong, *IMF Says. Bi-Weekly Bulletin Issue 22*, hal. 3.

nilai ekspor yang cukup signifikan tersebut tentu saja menguntungkan bagi negara karena menghasilkan pemasukan yang tidak sedikit.

Nilai penghasilan dan investasi yang besar di Indonesia tidak membuat buruhnya mendapatkan upah yang layak. Dikutip dari harian tempo bahwa menurut Portland Jobs with Justice (PJJ), buruh hanya mendapat 2,25 dolar AS dan naik menjadi 2,46 dolar pada April 1997 per hari untuk membuat sekitar 100 sepatu. Dengan upah tersebut, buruh tidak mampu membeli makanan dan mencari tempat tinggal yang cukup. Dalam rilis yang dikeluarkan Portland Jobs with Justice dikatakan bahwa : “jika anda menjadi buruh Nike Inc di Indonesia berarti anda dan sekitar 88 persen buruh lainnya mengalami kekurangan makanan yang sehat. Juga berarti anda harus tinggal di tempat yang kurang layak tanpa fasilitas air yang memadai.” Buruh harus bekerja 18 jam per hari dan akan diberhentikan jika mengeluh atau protes.⁵

Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan gaji yang diterima oleh bos dan petinggi Nike Inc, Philip H. Knight yang menerima gaji dan bonus sebesar 864.583 dolar dan bahkan 787.500 dolar pada tahun 1995. Jumlah ini belum termasuk stok Nike Inc sebesar 4,5 miliar dolar AS.⁶ Contoh di atas telah mampu menggambarkan bagaimana keegoisan kapitalis terhadap kesejahteraan buruh, di mana yang terjadi adalah *zero sum game*.⁷

Sejak mendirikan pabrik melalui perusahaan kontrak di Indonesia pada tahun 1988, Nike Inc. menerima tuntutan yang berasal dari berbagai laporan dan publikasi mengenai eksploitasi yang dilakukan terhadap buruh yang bekerja di pabrik-pabrik yang memproduksi produk untuk Nike Inc. Istilah eksploitasi yang dimaksud di sini adalah mekanisme pemanfaatan terhadap suatu subjek secara sewenang-wenang hanya untuk kepentingan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan rasa keadilan, etika kelayakan dan

⁵ (2016). Dipetik Oktober 29, 2016, dari tempo.co.id:
<http://www.tempo.co.id/ang/min/02/39/ekbis2.htm>

⁶ *Ibid.*

⁷ Zero sum game menggambarkan sebuah proses di mana jumlah keuntungan dan kerugian dari seluruh peserta adalah nol, keuntungan yang didapatkan oleh seorang peserta berasal dari kerugian peserta-peserta yang lain.

kompensasi kesejahteraan yang cukup.⁸ Dalam penjelasan ini, standar dari keadilan, etika kelayakan dan kompensasi kesejahteraan disesuaikan dengan peraturan yang ada dalam taraf nasional dan internasional mengenai hak-hak asasi manusia pada umumnya, dan hak-hak buruh pada khususnya.

Nike Inc yang sempat menerima beberapa tuduhan dan laporan atas pelanggaran hak kerja buruh di Indonesia, di antaranya adalah pelanggaran terhadap hak anak karena mempekerjakan anak-anak di bawah umur pada tahun 1980, kemudian tuntutan atas eksploitasi yang berupa penganiayaan terhadap buruh. Pada tahun 2001, terdapat laporan yang menyatakan bahwa pekerja atau buruh pabrik Nike Inc. di Indonesia dilecehkan secara verbal dan seksual, diberikan akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan, dan jam kerja yang melebihi standar.⁹ Pada 2002, 35 pekerja yang diwawancara mengaku bahwa mereka dibayar dengan gaji yang sangat rendah atau tidak sesuai standar. Pada 2004 terdapat laporan mengenai adanya pelecehan seksual di salah satu pabrik subkontraktor Nike Inc. di Indonesia. Kemudian pada tahun 2011 terdapat laporan di mana buruh pabrik Converse yang merupakan anak perusahaan Nike Inc. mengalami tindakan kekerasan fisik dan verbal.

Kondisi tersebut secara jelas menunjukkan pelanggaran terhadap Bab X Undang-Undang Republik Indonesia no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Lingkungan kerja yang buruk, ditambah dengan upah minim dan akses terbatas terhadap pelayanan publik menjadikan tingkat kesejahteraan buruh minim. Pemerintah Indonesia seharusnya mempunyai yurisdiksi terhadap pelanggaran ini, namun hingga saat ini tidak ada tindakan konkret yang menunjukkan penghukuman tersebut. Meskipun pemerintah sudah memperbolehkan gerakan pekerja atau buruh untuk memenuhi hak-haknya melalui dibentuknya UU No. 21 tahun 2000 tentang

⁸ (2016). Dipetik January 1, 2017, dari plato.stanford.edu:
<https://plato.stanford.edu/entries/exploitation/>

⁹ Connor, T. (2011, November 14). *We Are Not Machines*. Diambil kembali dari oxfam.org.au:
<http://www.oxfam.org.au/resources/filestore/originals/OAus-WeAreNotMachines-0302.pdf>

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun dalam prakteknya gerakan-gerakan buruh yang terjadi tidak pernah secara signifikan mempengaruhi posisi pemerintah dalam menangani permasalahan eksploitasi yang berdampak pada penganiayaan terhadap buruh-buruh Indonesia yang bekerja di pabrik Nike.

Kisruh buruh dan tuntutan mereka ternyata sudah berlangsung selama 15 tahun terakhir namun yang menjadi puncaknya adalah pada tahun 2014 di mana para buruh Nike Inc melakukan unjuk rasa dalam jumlah yang cukup besar di depan kantor BEI (Bursa Efek Indonesia). Para buruh Nike Inc di Indonesia tersebut selain dibantu oleh beberapa serikat buruh juga dibantu oleh beberapa NGO, di antaranya adalah *Team Sweat*. Mereka adalah sebuah koalisi internasional dari buruh Nike Inc. serta konsumen dan investor yang berkomitmen untuk mengakhiri ketidakadilan dalam praktek *sweatshop*¹⁰ Nike Inc di seluruh dunia. Dengan mendasarkan diri pada perjuangan terkait isu *sweatshop* Nike Inc yang sudah berusia lebih dari 15 tahun tersebut kemudian *Team Sweat* berjuang untuk memastikan bahwa :

1. Nike Inc membayarkan upah yang layak dan adil bagi para buruh pabriknya.
2. Nike Inc bersedia bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan kolektif dengan serikat pekerja di tingkat pabrik dan pemilik pabrik.
3. Nike Inc membuat komitmen jangka panjang dengan komunitas di Indonesia di mana terdapat pabrik.

Team Sweat jugalah yang membantu advokasi dalam beberapa tuntutan buruh Nike Inc, termasuk dalam aksi unjuk rasa pada tahun 2014 di Jakarta.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh ini biasanya diwarnai oleh beberapa tuntutan seperti, peningkatan kesejahteraan bagi mereka (buruh), dihapuskannya sistem *outsourcing* dan sistem kerja kontrak yang dinilai sangat merugikan bagi mereka, selain itu mereka menuntut akan naiknya Upah Minimum Regional (UMR). Hal

¹⁰ Sweatshop adalah julukan dari para aktivis untuk pabrik-pabrik yang mereka anggap sangat memeras keringat pekerjaanya

ini tidak terlepas dari (kesadaran kelas) bagaimana buruh merasa dieksploitasi oleh MNC.¹¹

B. Rumusan Masalah

Mengapa eksploitasi terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh Nike Inc. di Indonesia dapat berlangsung relatif lama (1999 – 2015) ?

C. Landasan Teori

Untuk menganalisis pengaruh Nike Inc dalam eksploitasi buruh di Indonesia, tentu diperlukan teori-teori serta konsep-konsep untuk memudahkan proses analisa. Dalam hal ini penulis ingin menganalisa melalui teori yaitu;

World System Theory

Teori ini di perkenalkan oleh Immanuel Wallerstein karena terori sebelumnya yaitu Teori Modernisasi dan Teori Dependensi menuai banyak kritik. Teori ini berusaha menjelaskan pembagian kerja secara teritorial dalam produksi, pertukaran barang dan bahan mentah. Hal ini terjadi karena adanya dua daerah yang saling bergantung yaitu *core states* dan *periphery* di mana fokus mereka yang berbeda yaitu padat modal dan padat karya di tambah satu daerah lagi yang menjadi penyangga yaitu *semi-periphery* yang memiliki percampuran antara keduanya.¹²

¹¹ Pontoh, C. H. (2011, Juni 18). *Kelas Dan Perjuangan Kelas Dalam Manifesto Komunis*. Diambil kembali dari indoprogress.com: <https://indoprogress.com/2011/06/kelas-dan-perjuangan-kelas-dalam-manifesto-komunis/>

¹² Martinez-Vela, Carlos A. 2001. "World System Theory." 1-2.

Menurut Karl Marx, kapitalisme merepresentasikan suatu bentuk kehidupan sosial di mana proses komodifikasi¹³ sudah menjelma hingga tahap perdagangan pekerja manusia sebagai alat produksi. Situasi ini berasal dari perkembangan sejarah hubungan antar kelas dan *powers*, yaitu adanya perkembangan *capital* atau modal yang diiringi dengan munculnya *wage labour* atau buruh bayaran. Di satu sisi, secara sosial modal dianggap sebagai *private property* atau kepemilikan pribadi dari segelintir pihak yang harus dipenuhi untuk melakukan proses produksi. Sementara itu, *wage labour* dianggap sebagai aktivitas yang harus dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan sumber penghidupan.¹⁴ Pemilik modal dan buruh tidak berhubungan secara langsung. Hubungan tersebut dijabatani oleh pekerja yang dibayar oleh pemilik modal, yang dibebaskan untuk memperlakukan buruh yang bekerja di bawahnya sebagai *property* atau barang pribadi mereka. Namun kebebasan ini terbatas karena pekerja pemilik buruh ini berada di bawah kontrol dari pemilik modal, sehingga mereka terpaksa untuk menjual buruh tersebut kepada para pemilik modal agar mendapatkan akses terhadap keperluan produksi, terlibat dalam aktivitas produktif dalam kehidupan sosial dan mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup dari gaji.¹⁵

Berdasarkan penjelasan ini, Marx menyatakan bahwa sistem kapitalisme secara paradoks mengembangkan kekuatan produktivitas dalam masyarakat hingga tahap yang cukup tinggi dan efisien, sedangkan di sisi lain juga menyebabkan proses-proses yang eksploitatif, tidak demokratis, dan memperlemah posisi salah satu kelas dalam masyarakat.¹⁶ Kelas buruh yang secara sosial ini menjadi lemah posisinya, secara sistemik dicegah untuk menyadari kekuatan produksi mereka yang sesungguhnya

¹³ Komodifikasi adalah transformasi barang, jasa, gagasan dan orang dalam komoditas, atau barang dagang

¹⁴ Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2010). *International Relations Theoris : Dicipline and Diversity* (2nd ed.). New York: Oxford University Press. Hal 161

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

dan kebebasannya ditekan agar kekuatan tersebut tidak dapat direalisasikan dengan mencegah kelompok ini melihat dan menyadari adanya suatu alternatif yang dapat menimbulkan transformasi hubungan produksi dalam kehidupan sosial. Marx menyebut proses ini dengan istilah ‘*alienation*’ atau ‘*fetishism*’.¹⁷ Mekanisme ini juga didukung oleh adanya ketergantungan negara secara struktural yang membutuhkan investasi dari pihak swasta, sehingga pemerintah cenderung untuk ‘melayani’ kepentingan jangka panjang dari kelas kapitalis yang mengendalikan modal ini.¹⁸

Mekanisme dan proses dominasi dan eksploitasi tidak dapat dihapuskan dari sistem kapitalis karena merupakan bagian integral dari sistem kapitalis itu sendiri.¹⁹ Mekanisme eksploitasi ini tidak dapat terjadi tanpa adanya koalisi kelas transnasional yang menyatukan para elit atau pemilik modal yang ada di negara maju dan berkembang. Kaum elit pemilik modal ini akan lebih mementingkan perolehan keuntungan, sehingga akan cenderung untuk menekan biaya produksi dan menimbulkan kerugian bagi kaum pekerja dan petani di negara berkembang atau negara *periphery*.²⁰

Mekanisme kapitalisme ini tidak hanya sekedar fenomena domestik, namun merupakan fenomena global karena adanya dinamika ekspansionis yang dilakukan oleh para pemilik modal untuk menyebarkan dan mengintensifkan organisasi kapitalisnya, dalam rangka mengakumulasi *capital* atau modal untuk mendukung ekspansi monopoli internasional mereka.²¹ Faktor domestik yang mendukung mekanisme dominasi dan eksploitasi yang datang dari lingkungan eksternal ini adalah adanya penguasa tanah, struktur sosial, aliansi kelas, dan peran negara yang cenderung mendukung kaum kapitalis. Dukungan ini muncul dan dipertahankan karena adanya ‘*selfish-benefits*’ atau keuntungan

¹⁷ *Ibid*, hal 161 – 162.

¹⁸ *Ibid*, hal 163

¹⁹ Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2010). *International Relations Theory* (4th ed.). USA: Pearson Education Inc. Hal 195

²⁰ *Ibid*.

²¹ Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2010). *Loc. Cit.*, hal 164

pribadi dari kelas borjuis dalam negara berkembang. Kaum borjuis dalam negeri ini beraliansi dengan kaum kapitalis dari luar negeri, dan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih memihak dan menguntungkan kaum kapitalis dan dirinya sendiri, sehingga semakin mendukung hubungan ketimpangan antara borjuis dan pekerja proletar dalam negeri. Mekanisme seperti ini sudah sangat mengakar dalam sistem kapitalis, karena dapat memenuhi kepentingan kaum kapitalis untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.²² Meskipun dianggap sebagai generalisasi yang dapat diterima, proses dominasi dalam sistem kapitalis ini berjalan berbeda-beda di setiap negara.²³

Menurut Immanuel Wallerstein, sistem ini merupakan sistem *world economy*, yang mulai dipertahankan sejak abad ke-16. Sistem ini ditandai dengan adanya pemisahan zona geografis yang didasari oleh adanya *division of labor* yang terjadi sebagai akibat dari perluasan kesejahteraan. Hubungan antar aktor dalam sistem ini tidak dibatasi oleh kesatuan struktur politis, melainkan disatukan oleh *division of labor* tersebut.²⁴ Sistem ini berubah menjadi sistem kapitalis ketika proses yang terjadi dalam sistem memberikan prioritas terhadap akumulasi modal yang tidak dibatasi waktu, yang menjadi mekanisme struktural dalam sistem. Motivasi lain dalam sistem selain akumulasi modal akan secara langsung tereliminasi.²⁵

Dalam sistem ini, setiap negara mempunyai peran dan kepentingannya masing-masing. *Core states* dalam satu pihak mempunyai kepentingan untuk mempertahankan kegiatan ekonomi yang bersifat *core-like*, di mana adanya ketimpangan dalam pertukaran kesejahteraan dan sumber daya. Di sisi lain, *weak states* atau negara-negara lemah tidak mempunyai cukup kemampuan untuk mempengaruhi sistem yang ditentukan oleh *core states*, sehingga selalu menjadi pihak yang didominasi dan dieksploitasi. Di antara keduanya, negara *semi-periphery*

²² Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2010). Loc. Cit., hal 196

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hal 228.

²⁵ *Ibid.*

mempunyai kepentingan untuk menjaga posisinya agar tidak tergelincir dan masuk dalam kategori negara *periphery*, dan mereka juga berusaha untuk meningkatkan posisinya untuk menjadi kelas *core states*.²⁶ Namun secara umum, hubungan antara kelompok negara ini ditunjukkan melalui hubungan ketimpangan struktur sosial, di mana adanya dominasi dari *core-states* yang mengeksploitasi *periphery states*.²⁷ Teori ini melihat *Multinational Corporation* (MNC) dan lembaga bank internasional, yang dianggap sebagai agen dari kaum borjuis internasional, merupakan aktor utama yang membentuk dan mempertahankan hubungan ketergantungan atau ini.²⁸

Dalam kasus ini maka menulis menjelaskan bahwa Nike Inc. sebagai subjek penelitian merupakan bagian dari para pemilik modal dan perusahaan multinasional yang berasal dari AS yang merupakan *core states*. Dengan modal yang besar yang dimiliki oleh para petinggi Nike Inc. membuat mereka mudah melakukan ekspansi ke negara lain yang memiliki ongkos produksi yang lebih murah dibandingkan dengan negara asalnya atas tujuan meraup untung yang sebesar-besarnya, di mana salah satunya adalah negara Indonesia. Menurut teori ini bahwa hubungan antara pemilik modal dengan buruh yang dibayar merupakan hubungan yang tidak langsung, karena di antara mereka terdapat pekerja yang di bayar oleh pemilik modal. Mereka bisa dikategorikan sebagai pemilik pabrik kontraktor yang memproduksi produk Nike serta mereka yang bekerja sebagai *supervisor* pabrik.

Buruh yang merasa hak-haknya tidak mereka dapatkan semakin tidak berdaya karena kebijakan pemerintah yang lebih pro investor serta regulasi mengenai pemenuhan hak-hak buruh tidak semuanya terealisasi membuat buruh semakin tidak memiliki kekuatan dan hal ini yang disebut sebagai '*alienation*'. Hal lain mengenai regulasi yang mendorong terjadinya *alienation* adalah masih diberlakukannya regulasi mengenai sistem *outsourcing* atau alih daya yang dianggap kurang menguntungkan

²⁶ *Ibid*, hal 230.

²⁷ Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2010). *Loc. Cit.*, hal 165

²⁸ Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2010). *Loc. Cit.*, hal 195

bagi pekerja serta dianggap juga oleh para serikat buruh sebagai bentuk *modern slavery*.²⁹ Hal tersebut didukung juga oleh investasi Nike Inc. di Indonesia yang besar tentu membuat pemerintah merasakan ketergantungan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan sebuah kerugian jika perusahaan sebesar Nike Inc. mengalihkan kegiatan produksinya ke negara lain. Selain itu AS sebagai *core states* di mana perusahaan Nike Inc. berasal tidak mampu berbuat banyak karena beberapa elemen pemerintahan AS yaitu senator juga didanai kampanyenya oleh Nike Inc. Sehingga hubungan yang terjadi antara para elite di negara *periphery* dan *core states* menjadi baik namun tidak demikian hubungan antara pemilik modal dan buruh, yang di mana mereka bekerja karena tidak memiliki pilihan lain juga semakin terpojok karena melawan sebuah sistem yang masif dan terstruktur.

D. Hipotesis

Nike Inc dapat melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja di Indonesia dalam waktu relatif lama karena :

Semakin terstrukturnya sistem ekonomi kapitalis dunia yang dikontrol oleh *core states* menjadikan *periphery states* tidak mampu untuk mempengaruhi sistem yang ‘aturan mainnya’ dibuat oleh *core states* dan menjadikannya selalu didominasi dan dieksploitasi. Juga semakin kuatnya Nike Inc selaku MNC dalam hal modal dan finansial ditambah lemahnya kontrol negara (pemerintah) Indonesia dan kurang menguntungkannya regulasi negara (pemerintah) Indonesia soal tenaga kerja/buruh (*outsourcing*) membuat Nike Inc memiliki *bargaining position* yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan serikat buruh dan NGO yang berjuang untuk para tenaga kerja Nike Inc di Indonesia.

²⁹ Pangaribuan, J. (2012, Februari 27). *Legalitas Outsourcing Pasca Putusan MK*. Retrieved from [http://www.hukumonline.com: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4b372fe9227/legalitas - ioutsourcing-i-pasca-putusan-mkbr-oleh--juanda-pangaribuan](http://www.hukumonline.com: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4b372fe9227/legalitas-ioutsourcing-i-pasca-putusan-mkbr-oleh--juanda-pangaribuan)

E. Metode Penelitian

a) Metode Pengumpulan Data

Penulis melengkapi data dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yang telah dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dan literatur-literatur yang relevan seperti buku-buku hasil pemikiran tokoh, buku-buku panduan lain, berita dari media massa, data elektronik (internet), dan data lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

b) Metode Pengolahan Data

Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode eksplanatif. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan eksploitasi Nike Inc yang sudah berlangsung relatif lama.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menganalisa kasus eksploitasi Nike Inc terhadap buruh di Indonesia juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dari sebuah perusahaan multinasional terhadap eksploitasi buruh di suatu negara di era globalisasi dan mengapa bisa berlangsung lama.

G. Batasan Penelitian

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan mengenai Nike Inc yang melakukan eksploitasi terhadap buruh di Indonesia maka dibutuhkan batasan penelitian. Adapun batasan penelitian ini adalah tahun-tahun di mana terjadinya eksploitasi dan bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi yang terjadi, serta apa saja yang mempengaruhi Nike Inc dapat melakukan praktek eksploitasinya di

Indonesia dengan waktu yang relatif lama. Selain itu, batasan penelitian juga dipusatkan pada kekuatan Nike Inc yang telah lama melakukan kegiatan produksinya di Indonesia serta seberapa jauh para tenaga kerja (buruh) merasa dieksploitasi. Serta batasan penelitian ini dibatasi lingkup waktunya yaitu dari 1997 di mana kisruh buruh pekerja Nike Inc mulai terjadi hingga pada tahun 2015 di mana isu eksploitasi buruh semakin terlihat.

H. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, metode penulisan, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai Nike Inc sebagai salah satu perusahaan *apparel* olah raga terbesar di dunia dan jaringannya di Indonesia.

BAB III akan membahas mengenai realita eksploitasi yang dilakukan oleh Nike Inc terhadap tenaga kerjanya di Indonesia.

BAB IV akan membahas mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya eksploitasi tenaga kerja Nike Inc di Indonesia.

BAB V merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.